

## BABV

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia Dan Pengurangan Kemiskinan”, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pada model persamaan 1 yaitu pengaruh antara pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia terlihat arah koefisien yang negatif. Koefisien yang negatif tersebut tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia yang *diproxi* dari indeks pembangunan manusia. Hal tersebut terkait dengan masih rendahnya pengeluaran pemerintah di sektor publik terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Seperti halnya dengan model persamaan 1, model persamaan 2 yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan, kesimpulan hasil analisis data tidak berbeda jauh dengan model 1. Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran publik tidak terbukti mempengaruhi kemiskinan. Seperti halnya penjelasan dalam model 1, diduga karena sangat kecilnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) membuatnya tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
3. Dalam model 3 tentang pengaruh pembangunan manusia terbukti secara signifikan mampu mempengaruhi terhadap kemiskinan. Seperti kita ketahui pembangunan manusia yang *diproxi* dari indeks pembangunan manusia / human development indeks memuat tiga tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*),

untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowlodge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. *Longevity* diukur dari angka harapan hidup, *knowlodge* direpresentasikan oleh ukuran angka melek huruf dewasa dan rata-rata sekolah sementara akses terhadap sumberdaya diukur dari paritas kekuatan daya beli riil terhadap pendapatan perkapita. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

4. Nilai-nilai Islam sudah seharusnya diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, begitu juga ketika umat Islam dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Secara teknis, dalam tinjauan literatur terungkap bahwa Islam mempunyai instrumen yang mampu membuat masyarakatnya sejahtera yaitu melalui instrumen keuangan publik, salah satunya zakat. Melalui zakat tersebut, pendekatan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dengan melihat akar permasalahan yang ada, bukan sekedar pendekatan pendapatan. Saat ini pendekatan pendapatan dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat miskin tersebut banyak digugat oleh kalangan ekonom konvensional, karena banyak menimbulkan masalah dan terbukti tidak efektif. Sehingga muncullah apa yang sekarang disebut dengan konsep pembangunan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Padahal Islam, sudah sejak lama menerapkan pendekatan yang komprehensif tersebut dalam pengentasan kemiskinan. Dengan instrumen zakat tersebut sekaligus bisa menjelaskan tentang dua hal yaitu bagaimana zakat yang secara teknis mampu mensejahterakan masyarakat dan dalam zakat mengandung spirit religiositas. Artinya, zakat bukan semata-mata hasil produk kebijakan, tetapi terkait dengan aspek keagamaan maka dalam pengelolaannya tidak terlepas dari spirit religiositas. Spirit religiositas tersebut akan nampak juga dalam hal pengeluaran

pemerintah. Dalam Islam, pengeluaran pemerintah tidak terlepas dari nilai-nilai Islam terutama *maqasid*. Pengaruh utama *maqasid* adalah mengurangi kesewenang-wenangan dalam keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan kriteria untuk menetapkan prioritas. Dalam kriteria tersebut terungkap, pengeluaran pemerintah diutamakan bagi kesejahteraan masyarakat, apabila ada sebagian masyarakat belum sejahtera maka kriteria kedua mengungkapkan bahwa Menghilangkan kesulitan dan penderitaan harus lebih diutamakan daripada mengejar kesenangan. Artinya jika masyarakat dihadapkan kepada kemiskinan, maka pengeluaran pemerintah diprioritaskan untuk mengatasi kemiskinan terlebih dahulu dibandingkan untuk kepentingan mengejar kesenangan. Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap investasi di sektor publik (pendidikan dan kesehatan), sesuai dengan kriteria pengeluaran pemerintah lainnya yaitu sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan adalah juga wajib. Berdasarkan kriteria tersebut maka suatu keharusan untuk meningkatkan kemampuan si miskin agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih banyak melalui akses yang lebih besar dan lebih mudah kepada pendidikan, fasilitas training dan kesehatan serta keuangan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang akan disarankan oleh penulis untuk pengambil kebijakan dan mahasiswa atau akademisi. Antara lain:

1. Pengambil kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian (model persamaan 3) diketahui bahwa pembangunan manusia yang tercermin dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM) akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan IPM, salah satunya terkait dengan pengeluaran pemerintah untuk sektor

publik dalam rangka penyediaan kapasitas dasar dan daya beli bagi masyarakatnya terutama masyarakat miskin. Keberpihakan pengeluaran pemerintah untuk mengurangi kemiskinan (*pro poor fiscal policy*) sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana dalam Islam, tujuan utama dari pengeluaran pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya, dan apabila kemiskinan tidak bisa dihindari maka pengeluaran pemerintah terlebih dahulu harus diprioritaskan bagi penanggulangan kemiskinan dibandingkan dengan pembangunan proyek-proyek yang menciptakan kesenangan. Dengan demikian tidak ada salahnya menanamkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, sekaligus akan menjauhkan diri dari praktik-praktik kesewenang-wenangan dan perilaku korup dalam pengelolaan keuangan publik. Juga tidak ada salahnya apabila pemerintah mulai memikirkan kembali zakat sebagai instrumen keuangan publik tersebut. Dengan adanya zakat sebagai instrumen keuangan publik akan menumbuhkan kembali spirit religiositas di seluruh kehidupan baik itu di kalangan masyarakat maupun jajaran pemerintahan, yang sekaligus sebagai instrumen teknis dalam mensejahterakan masyarakat.

2. Akademisi dan Mahasiswa. Setelah diketahui hasil penelitian ini, besar kecilnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik bisa mempengaruhi terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan. Untuk itu perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan sistem keuangan negara dari aspek penerimaan. Mengingat saat ini sumber penerimaan negara sangatlah terbatas hanya mengandalkan sumber-sumber yang konvensional saja yaitu pajak.

Padahal dalam sistem keuangan Islam masa lalu, zakat sangat potensial sebagai sumber penerimaan negara disamping sumber penerimaan lainnya seperti halnya pajak. Dengan adanya sumber penerimaan negara yang saat ini hanya bersumber dari pajak, akan membatasi pemerintah Indonesia dalam mengalokasikan pengeluaran

pemerintah termasuk pada sektor publik (pendidikan dan kesehatan). Adanya zakat bisa dijadikan sebagai sumber yang bersama dengan pajak bisa meningkatkan sumber penerimaan negara, terutama untuk membiayai sektor publik yang terkait dengan pembangunan manusia dan kemiskinan. Sehingga alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor publik yang berguna bagi peningkatan pembangunan manusia dan kemiskinan bisa ditingkatkan. Penelitian-penelitian yang terkait dengan zakat sebagai instrumen penerimaan keuangan negara belum banyak dilakukan. Sekaligus juga dari aspek keilmuan bisa mengembangkan sistem keuangan negara yang Islami, tentunya penelitian ini juga harus disertai dengan kajian fiqh disamping kajian ekonominya itu sendiri.

